

ANALISIS PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARABARAT

Muhammad Alwi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
Muhnurrahmah303@gmail.com

I Dewa Ketut Yudha S

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
dewayudha1229@gmail.com

Lalu Dema Alkandia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah, menganalisis derajat kemandirian Keuangan daerah. dan menganalisis derajat desentralisasi Keuangan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan efektifitas pendapatan asli daerah (PAD) dan pajak daerah dari tahun 2012 sampai tahun 2015 menunjukkan rasio efektivitas pemungutan sangat efektif . Sedangkan efektifitas pemungutan retribusi daerah juga menunjukan kriteria tingkat efektifitasnya adalah sangat efektif pada tahun 2012 sampai tahun 2014 sedangkan pada tahun 2015 termasuk kriteria efektif . Kemampuan keuangan daerah pada periode tahun 2012-2015 termasuk dalam kriteria rendah. Berdasarkan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diketahui bahwa pada tahun 2012 termasuk dalam Pola Hubungan Instruktif yang menunjukkan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Pada tahun 2013 sampai tahun 2015 pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah memperlihatkan pola Hubungan konsultatif yang berarti campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Derajat desentralisasi fiskal kota Mataram termasuk kriteria tingkat kemampuan keuangan daerah yang kurang dalam periode tahun 2012 -2015, yang menunjukan bahwa keuangan daerah kota Mataram sangat tergantung pada sumber penerimaan dari pusat maupun pada tingkat provinsi

Kata kunci: Pajak Daerah, Retribusi dan PAD

ABSTRACT

The purposes of this research are analyze effectivity of the yells of The Regional tax, regional retribution and The Regional origin income. To analyze the regional finance independence and decentralization degree. The main contribution that dominant to buffer Matarams PAD source from regional tax income that in average has contribution 48,15 % and other income source of PAD has average contribution 35,83 %, while The regional retribution has contribution 12,66 % to PAD and The yells of The severed Regional Managing has average contribution 3.31 % in period of 2012 to 2015. The Effectivity degree that very effective in years of 2012 to 2014 and in 2015 they are in effective category.

The ability of Regional Finance in period of 2012 to 2015 included In Low category. Base on the relation pattern of The Central Government and Regional Government Known that in 2012

they have instructive relationship that show that the role of the central government more dominant than Regional government. (mean the Regional Government has not ability to apply Regional otonomy). In 2013 to 2015 the relationship pattern between Central and Regional Government show consultative pattern that mean that the Intervency of the Central Government start to decrease because the Regional Governmenbe assumed little more be able to apply Regional Otonomy.

Mataram Fiscaldesentralisation degree include in category of lack ability of regional finance in periode of 2012 to 2015. It shows that Mataram regional finance very dependent to Central and Province income source

Keywords : Local Tax, Retribution, PAD

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan yang sah lainnya. PAD, yang salah satunya berupa pajak daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Semakin besar pajak dan retribusi daerah yang diterima otomatis semakin meningkatkan PADnya. Kemandirian Pemkab/Pemkot dapat dilihat dari besarnya PAD yang diperoleh Pemkab/Pemkot. Semakin besar pajak dan retribusi yang diperoleh oleh kabupaten dan kota tersebut dalam membiayai pengeluaran untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat seperti membantu dan memfasilitasi sarana dan prasarana masyarakat. Retribusi daerah merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara dikarenakan ada jasa tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu secara perorangan. Pungutan dari masyarakat ini akan menjadi sumber pendapatan bagi daerah tersebut, dan bisa dijadikan sumber utama pendapatan daerah selain pajak daerah, bagian laba usaha daerah maupun nilai-nilai PAD yang sah.

Kota Mataram sangat berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang pada giliran akan meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram. Kemungkinan ini karena kota Mataram sebagai ibukota Provinsi NTB dan sebagai pusat perdagangan, pemerintah, pendidikan dan jasa pelayanan wisata.

Oleh karena itu, sangat penting menganalisis penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang pada akhirnya akan mempengaruhi total pendapatan daerah pada masa yang akan datang.

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah
2. Untuk menganalisis derajat kemandirian Keuangan daerah Kota Mataram.
3. Untuk mengetahui derajat desentralisasi Fiskal Kota Mataram

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Menurut Mardiasmo (2002), "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian adalah penelitian deskriptif yaitu suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia , suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang guna membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistimatis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara yang diselidiki, dianalisis kemudia disimpulkan (Nazir, 1999;63)

Lokasi lenelitian ini dilaksanakan di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat dengan alasan bahwa kota Mataram merupakan Ibu Kota Provinsi NTB dan ssebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pemerintahan, dan sosial budaya.

Pengumpulan data mengadakan penelitian kepustakaan dengan mempelajari dan mengumpulkan data dari buku-buku dan jurnal yang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Berupa data APBD tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini bersumber dari Kantor BPS Provinsi NTB dan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Mataram serta Instansi yang mengelolah penerimaan pajak daerah dan restribusi daerah.

1. a. Untuk menganalisis efektivitas pemungutan pajak daerahdigunakan alat analis sebaga berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

- a. Untuk menganalisis efektivitas pemungutan Retribusi daerah digunakan alat analis sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

- c. Untuk menganalisis efektivitas pemungutan PADdi gunakan alat analis sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efektivitas penilaian kinerja sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 yaitu:

Tabel 1. Kriteria Efektivitas Pemungutan PAD

Persentase kinerja keuangan	Kriteria penilaian kinerja
Lebih dari 100 %	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90 %	Cukup efektif
60-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60 %	Tidak efektif

Sumber: Keputusan Mendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

2. Untuk menganalisis Rasio Kemandirian Keuangan daerah Kota Mataram digunakan formula Sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pinjaman}} \times 100\%$$

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman (Bisma, 2010:77).

Secara konsepsional, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard memperkenalkan empat macam pola hubungan situasional yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah (Halim, 2004:188) yaitu:

- Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- Pola Hubungan Delekatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Dilihat sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah dari sisi keuangan dapat dRendah Sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	25 - 50	Konsultatif
Sedang	50 - 75	Partisipatif
Tinggi	75 - 100	Delekatif

Sumber: Halim, 2004: 189

3. Derajat Desentralisasi Fiskal

Untuk menganalisis Kemampuan Kota Mataram dalam menyelenggara Desentralisasi digunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD Kota Mataram}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang dibirikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelolah pendapatan. Semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi (Mahmudi,2010). Menurut artikel yang diterbitkan Kementerian Keuangan (2011), Jika derajat desentralisasi berada di atas 50% menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menyelenggarakan desentralisasi.

Derajat desentralisasi fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan TPD (Total Penerimaan Daerah), menurut hasil penemuan Tim Fisipol UGM menggunakan skala interval sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut:

Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

Tabel 3. Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Prosentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010:78)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber yang berasal dari wilayah Kota Mataram yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang berlaku: Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :

- Hasilpajak daerah.
- Hasil retribusi daerah
- Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Lain lain pendapatan Asli daerah.

Adapun besarnya penerimaan PAD Kota Mataram dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Perkembangan penerimaan pendapata asli daerah kota mataram tahun 20012-2015 (rp jutaan)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp juta)	Pertumbuhan (%)
2012	95.877	16,47
2013	139.877	44,95
2014	202.589	44,83
2015	225.076	11,10

Sumber : Mataram Dalam Angka diolah.

Berdasarkan pada tabel di atas, diketahui bahwa jumlah PAD kota Meningkat dari tahun 2012 samapai tahun 2015 dengan pertumbuhan yang berpuluktuasi dari pertumbuhan sebesar 16,47 % pada tahun 2012meningkat secara deratis pada tahun 2013 dan tahun 2014 dengan pertumbuhan 44,95% dan 44,83% kemudian turun secara drastis pada tahun 2015 dengan pertumbuhan hanya sebesar 11,10 %. Meskipun pertumbuhan PAD berfuluktuasi naman demikian secara absolut meningkat terus dari tahun 2012 sebesar Rp95.877.000.000 meningkat menjadi Rp 225,076.000.000. Peningkatan PAD ini karena semua sumber penerimaan PAD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PAD kota Mataram Nampak pada tabel berikut :

Tabel 5. Kontribusi sumber penerimaan pad terhadap nilai pad kota mataram

No	Sumber-Sumber PAD	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Rata-rata Kontribusi (%)
1	Pajak Daerah	47,56	56,75	45,29	43,03	48,15
2	Retribusi Daerah	17,55	14,48	10,5	8,11	12,66
3	Hasil Pengelolaan Daerah yg Dipisahkan	4,84	1,97	3,70	2,76	3,31
4	Lain-lain PAD	30,05	26,80	40,39	46,10	35,83

Sumber : Data diolah dari Lampiran ...

Berdasarkan pada tabel di atas diketahui bahwa, kontribusi utama yang dominan mendukung PAD kota Mataram bersumber penerimaan pajak daerah dengan rata-rata kontribusi sebesar 48,15% , lain-lain PAD dengan kontribusi rata-rata sebesar 35,83 %, sedangkan kontribusi sumber penerimaan PAD lain jauh lebih rendah dibandingkan kontribusi pajak daerah dan lain-lai PAD seperti retribusi daerah dengan kontribusi 12,66 % dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dengan kontribusi hanya rata-rata 3,31 %selama periode 2012-2015. Analisis Data Efektivitas Pemungutan PAD

Tabel 8. Perkembangan efektivitas pemungutan pad kota mataram 2012-2015

Tahun Anggaran	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2012	65.561.779	95.877.065	146,24	Sangat efektif
2013	124.958.000	139.877.000	111,94	Sangat efektif
2014	160.495.000	202.589.000	126	Sangat efektif
2015	215.600.000	225.076.000	104	Sangat efektif

Sumber : Data diolah dari Lampiran ...

Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah

Tabel 9. Perkembangan Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Kota Mataram 2012-2015dalam Ribuan Rupiah

Tahun Anggaran	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2012	34.228.060	45.596.901	133,24	Sangat efektif
2013	71.550.000	79.375.000	110,94	Sangat efektif
2014	83.080.000	91.750.000	110	Sangat efektif
2015	92.655.000	96.845.000	105	Sangat efektif

Sumber : Data diolah dari Lampiran ...

Efektivitas Pemungutan Restribusi Daerah

Tabel 10. Perkembangan Efektivitas Pemungutan Retribusi Daerah Kota Mataram 2012-2015 dalam Ribuan Rupiah

Tahun Anggaran	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2012	15.593.719	16.825.137	107,90	Sangat efektif
2013	17.824.000	20.251.000	113,62	Sangat efektif
2014	17.918.000	20.964.000	117	Sangat efektif
2015	19.874.000	18.248.000	92	efektif

Sumber : Data diolah dari Lampiran ...

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah Kota Mataram dalam merealisasikan pendapatan asli daerah, pajak daerah dan retribusi daerah yang direncanakan yang dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100%.

Berdasarkan pengukuran keuangan tersebut maka dapat dilihat hasil perhitungan rasio efektifitas PAD, pajak daerah dan retribusi daerah Kota Mataram pada tahun anggaran 2012-2015 seperti disajikan pada tabel 4.6, 4.7 dan 4.8.

Berdasarkan tabel 4.6, 4.7 dan 4.8. rasio efektifitas pendapatan asli daerah (PAD) dan pajak daerah dari tahun 2012 sampai tahun 2015 menunjukkan rasio efektivitas pemungutan pajak sesuai kriteria termasuk kategori sangat efektif dengan tingkat efektifitas rata-rata beradapada di atas 100 %, karena pendapatan yang ditargetkan lebih kecil dari pada realisasinya, atau terjadi *under estimate* terhadap target yang ditetapkan. Sedangkan efektifitas pemungutan retribusi daerah juga menunjukkan kriteria tingkat efektifitasnya adalah sangat efektif pada tahun 2012 sampai tahun 2014 sedangkan pada tahun 2015 termasuk kriteria efektif . Hal ini berarti pemerintah daerah Kota Mataram sudah tepat dalam merencanakan PAD, pajak daerah dan retribusi karena mampu merealisasikan PAD yang sudah ditargetkan.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal)

Tabel 11. Perkembangan Perkembangan Rasio Kemandirian Keunngan Daerah Kota Mataram 2012-2015 dalam Ribuan Rupiah

Tahun Anggaran	Nilai PAD	Dana Transfer	Rasio Kemandirian (%)	Kriteria Kemampuan keuangan daerah	Pola Hubungan
2012	95.877.065	544.998.107	19,03	Rendah	Insruktif
2013	139.877.000	580.925.000	24,08	Rendah	Konsultatif
2014	202.589.000	88.015.000	23,01	Rendah	Konsultatif
2015	225.076.000	963.819.000	23,35	Rendah	Konsultatif

Sumber : Data diolah dari Lampiran

Berdasarkan pada tabel 4.9, di atas dapat diketahui bahwa kemampuan keuangan daerah pada pereode tahun 2012-2015 termasuk dalam kriteria rendah. Berdasarkan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diketahui bahwa pada tahun 2012 termasuk dalam Pola Hubungan Instruktif karena peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Pada tahun 2013 sampai tahun 2015 pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah memperlihatkan pola Hubungan konsultatif yang berarticipur tangan

pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

Desentralisasi Fiskal

Ukuran ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan yang dikelola sendiri oleh daerah terhadap total penerimaan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Total Pendapatan Daerah merupakan jumlah dari seluruh penerimaan dalam satu tahun anggaran.

Derajat desentralisasi fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan TPD (Total Penerimaan Daerah), menurut hasil penemuan Tim Fisipol UGM menggunakan skala interval sebagaimana yang terlihat Bab III.

Tabel 12. Perkembangan Efektivitas Pemungutan Pad Kota Mataram 2012-2015 dalam Ribuan Rupiah

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan PAD (000Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (000Rp)	Derajat Desentralisasi Fiskal	Kriteria Kemampuan Keuangan daerah
2012	95.877.065	755.234.155	12,69	Kurang
2013	139.877.000	865.840.000	16,15	Kurang
2014	202.589.000	1.083.105.000	18,70	Kurang
2015	225.076.000	1.188.895.000	18,93	Kurang

Sumber : Data diolah dari Lampiran

Berdasarkan tabel 4.10 di atas diketahui derajat desentralisasi fiskal kota Mataram termasuk kriteria tingkat kemampuan keuangan daerah yang kurang dalam periode tahun 2012-2015. Hal dapat menunjukkan bahwa keuangan daerah kota Mataram sangat tergantung pada sumber dari penerimaan dari pusat maupun pada tingkat provinsi seperti dana perimbangan dan lain-lain pendapat yang sah seperti hibah, dana bagi hasil dari Provinsi, dan bantuan keuangan dari Provinsi.

SIMPULAN

1. Rasio efektifitas pendapatan asli daerah (PAD) dan pajak daerah dari tahun 2012 sampai tahun 2015 menunjukkan rasio efektifitas pemungutan pajak sesuai kriteria termasuk kategori sangat efektif dengan tingkat efektifitas rata-rata beradapada di atas 100 %, karena pendapatan yang ditargetkan lebih kecil dari pada realisasinya, atau terjadi *under estimate* terhadap target yang ditetapkan. Sedangkan efektifitas pemungutan retribusi daerah juga menunjukkan kriteria tingkat efektifitasnya adalah sangat efektif pada tahun 2012 sampai tahun 2014 sedangkan pada tahun 2015 termasuk kriteria efektif.
2. Kemampuan keuangan daerah pada periode tahun 2012-2015 termasuk dalam kriteria rendah. Berdasarkan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diketahui bahwa pada tahun 2012 termasuk dalam Pola Hubungan Instruktif yang menunjukkan peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Pada tahun 2013 sampai tahun 2015 pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah

memperlihatkan pola Hubungan konsultatif yang berarticipur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah

3. Derajat desentralisasi fiskal kota Mataram termasuk kriteria tingkat kemampuan keuangan daerah yang kurang dalam periode tahun 2012 – 2015, yang menunjukkan bahwa keuangan daerah kota Mataram sangat tergantung pada sumber penerimaan dari pusat maupun pada tingkat provinsi seperti dana perimbangan dan lain –lain pendapat yang sah seperti hibah, dana bagi hasil dari Provinsi, dan bantuan keuangan dari Provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2012. *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin Vol. XXI, No. 1. Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa – Bali)*.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*.
- Bisma, I Dewa Gde & Susanto, Hery. 2010. *Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus Vol. 4 No. 3. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-3007*.
- Erlina, Sri Mulyani, 2007. *Metedologi Penelitian Bisnis*, USU press, Medan.
- Ghozalli, Imam, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, Undang Undang nomor 12 tahun 2008 revisi kedua undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- _____, undang-undang nomor 28 tahun 2009 revisi kedua undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- _____, Peraturan Pemerintah nomo 91 tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2012 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Halim, Abdul. (penyunting). 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- _____, 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____, 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik. (Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : ANDI.

- _____, 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. ANDI.
- Mahsun, Muhammad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Na, Sartina. 2011. *Pengaruh desentralisasi fiskal dan Fiscal stress Terhadap pertumbuhan Ekonomi melalui kinerja Keuangan daerah Di kabupaten/kota se-propinsi aceh*. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Nugraha. 2014. *Desentralisasi Fiskal di Indonesia (Konsep, Kenyataan dan Tantangan)*. Bandung.
- Purwono, Herry. 2011. *Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta : Erlangga
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta : Rajagrafindo Persada
- _____, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- _____, 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Tarigan, Raja Malem. 2012. *Pengaruh Desentralisasi Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kota Provinsi Sumatera Utara*. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.